**UPAYA HONG KONG DALAM MENGATASI DAMPAK KEBIJAKAN *NATIONAL SWORD* TAHUN 2018-2020**

**Indah Tri Oktavianingrum[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *The National Sword policy is a waste import ban policy issued by China in 2018. The implementation of National Sword policies greatly affects exporters, such as Hong Kong. With the National Sword policy, Hong Kong has to manage its own waste. Hong Kong also made a series of programs to increase recycling activities and reduce their waste, especially plastic, paper and textile waste. This study aims to describe Hong Kong’s efforts to overcome the impacts of National Sword policy in 2018-2020. The author uses a qualitative research method with primary and secondary data types obtained through a literature study of the World Trade Organization, UN Comtrade, Hong Kong Government’s data, and articles obtained from the internet. The data has been obtained is then studied an elaborated through Matthew Paterson’s green political theory so as to find comprehensive analysis results. The results of the research show that Hong Kong has made several efforts to reduce waste, increase recycling, and educate the public about the importance of protecting the environment.*

***Keywords: National Sword Policy, Hong Kong, China, Import Waste.***

**Pendahuluan**

Isu lingkungan menjadi isu penting dalam hubungan internasional, negara-negara mulai menyadari akan pentingnya lingkungan bagi keberlangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Permasalahan lingkungan menjadi agenda dalam hubungan internasional, karena perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan adalah sampah, khususnya sampah plastik yang tidak mudah untuk diurai dan mencemari lingkungan. Pada 2016, sampah plastik dunia menghasilkan 242 juta ton (datatopics.worldbank.org, 2018).

Masih banyak negara-negara yang belum optimal dalam menangani sampah karena tingkat daur ulang yang rendah dan minimnya fasilitas daur ulang. Oleh karena itu, negara-negara penghasil sampah melakukan jual-beli limbah sampah atau perdagangan limbah global. Perdagangan limbah global dinilai efektif dalam mengalokasikan sumber daya untuk mengelola limbah.

Sejak tahun 1988 hingga 2016, Tiongkok telah mengimpor 170.5 juta metrik ton atau sekitar 72.40% sampah plastik dunia (Martin Armstrong, 2018). Terdapat beberapa mitra dagang yang mengekspor sampah plastik mereka ke Tiongkok, seperti Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Jerman, Belgia, Filipina, Australia, Indonesia, dan Kanada (ourworldindata.org, 2018). Kegiatan impor sampah plastik Tiongkok mulai menjadi fokus pemerintah semenjak berdampak serius pada lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan Tiongkok dibagi menjadi polusi udara, polusi air, dan polusi tanah.

Untuk memperketat kebijakan mengenai impor sampah, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan *National Sword.* Kebijakan *National Sword* Tiongkok adalah kebijakan lanjutan dari *Operation Green Fence* yang berfokus pada kegiatan ilegal impor sampah dan membatasi masuknya limbah sampah ke Tiongkok. Kebijakan *National Sword* telah diberitahukan oleh Tiongkok kepada *World Trade Organization* (WTO) pada 18 Juli 2017 dan diberlakukan pada 1 Januari 2018 (World Trade Organization, 2017).

Pembatasan masuknya limbah sampah ke Tiongkok membuat para eksportir merubah tujuan ekspor mereka pada negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, India, dan lain-lain. Eksportir juga terkena dampak seperti penumpukan limbah sampah. Salah satu eksportir yang paling terdampak adalah Hong Kong yang menjadi eksportir limbah sampah plastik terbanyak Tiongkok pada 2016.

**Grafik 1. Daftar 10 Eksportir Terbesar Sampah Plastik di Tiongkok Tahun 2016**

****

 **Sumber: Ourworldindata.org**

Hubungan ekonomi antara Hong Kong dan Tiongkok menjadi unik karena berada dalam satu negara yang berdaulat, namun mampu melakukan kegiatan ekspor dan impor. Hal tersebut terjadi karena Hong Kong mempertahankan posisi pelabuhan bebas dan wilayah pabean yang terpisah dengan Tiongkok, berdasarkan Deklarasi Bersama Britania Raya dan Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong mendapatkan otonomi tingkat tinggi di Tiongkok, dibawah prinsip “Satu Negara, Dua Sistem” yang membuat Hong Kong mendapatkan hak untuk mengatur sendiri urusan pemerintah, ekonomi, dan lain-lain. Namun, untuk urusan luar negeri dan pertahanan Hong Kong harus diatur oleh Tiongkok. Oleh karena itu, Hong Kong mampu melakukan hubungan perdagangan dengan wilayah, negara, dan organisasi internasional termasuk Tiongkok (Zeng Huaquan, 2007). Sehingga, setelah adanya kebijakan *National Sword*, Hong Kong ikut terkena dampak pelarangan impor sampah oleh Tiongkok.

Tiongkok merupakan tujuan ekspor terbesar Hong Kong terkait limbah sampah, sehingga sangat sulit bagi Hong Kong untuk mendaur ulang sampah, karena fasilitas daur ulang Hong Kong yang kurang dan terbatas, adanya budaya konsumerisme masyarakat, lahan TPA yang terbatas, dan semakin diperburuk dengan kebijakan larangan tersebut.

**Kerangka Teori**

***Green Political Theory***

*Green Political Theory* atau teori politik hijau adalah ideologi politik yang memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berawal pada kepedulian terhadap lingkungan hidup. Politik hijau biasanya memiliki kaitan dengan politik penguasaan dan pemilihan sumber daya alam dan perdagangan pada produknya, serta bagaimana cara pemerintah menggunakan sumber daya tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan (Amelda Salim, 2013). Masalah yang berkaitan dengan teori ini adalah hubungan antara alam dan teori politik. Teori politik hijau yang berfokus pada alam harus diimbangi dengan politik, dimana manusia bertindak secara politik untuk memberikan perubahan yang berarti pada alam (Andrew Vincent, 2018).

Teori politik hijau menurut Matthew Paterson memiliki 3 asumsi dasar, yaitu ekosentrisme, batas pertumbuhan, dan desentralisasi. Pertama, ekosentrisme dalam pandangan Eckersley adalah karakteristik teori politik hijau yang menentang pandangan antroposentrisme yang menganggap manusia sebagai pusat segalanya. Antroposentrisme menganggap kepentingan materi manusia lebih penting dibandingkan dengan kelangsungan ekosistem. Pandangan ekosentrisme dibagi menjadi dua karakter yaitu empiris dan etis. Secara empiris, ekosentrisme merupakan suatu pandangan dunia yang pada dasarnya semua makhluk hidup terikat dalam hubungan dengan lingkungan. Ekosentrisme memandang tidak ada pembeda yang kuat antara manusia dan alam. Secara etis, menilai adanya persamaan hak dalam ekosentrisme yang terdapat pada hubungan erat antara lingkungan, manusia dan spesies lain selain manusia. Oleh karena itu, manusia tidak boleh untuk mendominasi alam.

Kedua, batas pertumbuhan. Pembatasan tertentu kepada manusia dalam melakukan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi manusia mampu mengakibatkan berbagai macam krisis lingkungan yang saling terkait. Pertumbuhan dan peningkatan tersebut membuat berkurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyediakan bahan baku produksi industri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, berakibat pada berkurangnya tempat daya serap lingkungan untuk mengasimilasi berbagai macam limbah sampah. Politik hijau berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan stabilisasi dan negara-negara yang terkait khususnya negara industri harus mengurangi konsumsi materi dan energi. Carter berpendapat bahwa negara menjadi bagian dari dinamika masyarakat modern yang telah menyebabkan berbagai macam krisis lingkungan. Carter melanjutkan bahwa dinamika lingkungan penuh dengan resiko karena dengan adanya hubungan ekonomi yang kompetitif antar negara sehingga negara akan mengembangkan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Ketiga, desentralisasi. Dalam politik hijau, menurut John Dryzek desentralisasi memiliki keuntungan, yaitu komunitas skala kecil yang bergantung pada layanan lingkungan di daerah mereka akan mampu membuat komunitas tersebut lebih peka terhadap kerusakan lingkungan disekitar mereka, sehingga respon untuk memperbaiki lingkungan lebih cepat. Adanya pemerintah lokal dinilai lebih mudah untuk mengontrol upaya-upaya penyelesaian masalah lingkungan. Menurut Goodin, perbaikan masalah lingkungan dengan menggunakan desentralisasi dinilai lebih efektif. Namun, negara-negara juga memiliki upaya menjaga lingkungan atau kerjasama lingkungan dengan negara lain. Goodin juga berpendapat bahwa permasalahan lingkungan dalam lingkup global perlu, sehingga terjalinnya hubungan kerjasama global untuk menyelesaikan bersama masalah lingkungan, serta perlu adanya organisasi lingkungan yang resmi pada masing-masing negara (Matthew Paterson, 2005).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan Hong Kong dalam memanfaatkan limbah dengan mengeluarkan program secara domestik dan ikut serta dalam kegiatan lingkungan global agar menjaga lingkungan sehingga tidak semakin tercemar.

**Metode Penelitian**

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Penelitian ini menggambarkan mengenai bagaimana upaya pemerintah Hong Kong dalam mengatasi dampak kebijakan *National Sworid* tahun 2018-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung seperti data dari WTO, UN Comtrade, dan pemerintah Hong Kong. Adapun data sekunder yang diperoleh melalui berbagai jurnal, buku, skripsi dan artikel yang ditemukan melalui internet. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research.* Dalam teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.

**Hasil dan Pembahasan**

Sejak adanya reformasi ekonomi pada 1978 oleh Deng Xiaoping, Tiongkok mulai melakukan impor sampah yang dapat didaur ulang. Bergabungnya Tiongkok pada *World Trade Organization* (WTO) pada 2001 membuat meningkatnya permintaan bahan baku. Tiongkok semakin meningkatkan impor sampah khususnya pada besi tua, tekstil dan sampah plastik. Sejak 1995 hingga 2016 impor sampah Tiongkok meningkat dari 4.5 juta menjadi 45 juta ton (Rami Al-Ademi, 2020). Bahan dari impor sampah memiliki kualitas tinggi sehingga menguntungkan para produsen industri daur ulang. Hal tersebut menjadi alasan Tiongkok lebih memilih menggunakan impor sampah daripada sampah domestik karena biaya pengumpulan sampah yang sangat tinggi.

Namun, pabrik industri daur ulang juga melakukan penumpukan sampah karena tidak semua partikel sampah impor digunakan. Sisa material yang tidak digunakan kemudian dibawa ke TPA yang kemudian meninggalkan persoalan lingkungan Tiongkok yaitu polusi udara, air dan tanah yang disebabkan oleh pabrik industri dan penempatan TPA yang berada di sekitar perairan. Penumpukan sampah yang tercemar dan tidak layak pakai menimbulkan beberapa masalah, seperti berkurangnya lahan untuk membuang sampah, berkurangnya ruang untuk mengembangkan lahan menjadi tempat yang bermanfaat, tanah dan air terkontaminasi, membahayakan kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Selain itu, banyak masyarakat yang tinggal dan bekerja di sekitar lokasi TPA yang akan terpapar bau yang tidak sedap serta gangguan kesehatan seperti sistem pencernaan, dermatologis, pernapasan, diare, sakit kepala nyeri dan iritasi pada kulit, hidung dan mata, tipes, dan sakit maag (Yanli Zhu et al, 2020).

Pencemaran lingkungan yang cukup parah, sebagian besar disebabkan oleh perusahaan industri dan pendaur ulang. Hal tersebut membuat pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan sementara yang bernama *Operation Green Fence* pada 1 Februari 2013 sebagai pemeriksaan secara ketat terhadap kontainer-kontainer impor limbah yang masuk ke Tiongkok. *Operation Green Fence* bertujuan untuk menegakkan UU impor yang ada (Konvensi Basel 1992), membatasi biaya bagi produsen dalam negeri terkait penyortiran kontaminasi limbah dengan batas 1.5%, membatasi pencemaran lingkungan, dan melarang semua limbah berbahaya (Lorenzo Donini, 2018). Untuk memperketat kebijakan mengenai impor sampah, pemerintah Tiongkok kembali mengeluarkan kebijakan baru pada 2018, kebijakan ini bernama kebijakan *National Sword.*

Kebijakan *National Sword* Tiongkok adalah kebijakan yang berfokus pada kegiatan ilegal impor sampah dan membatasi masuknya limbah sampah ke Tiongkok. Kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan kegiatan impor sampah ke Tiongkok dengan melarang masuknya 24 jenis limbah padat, dan mencabut lisensi para pengimpor yang mengirim ilegal limbah sampah. Dalam kebijakan ini, Tiongkok menetapkan standar kontaminasi yang baru yaitu menerima sampah 0.5% standar kontaminasi pada plastik, kertas, kayu, sampah motor listrik, kabel, dan beberapa jenis besi; 1% pada logam non besi dan 0.3% untuk bahan-bahan bekas kendaraan (World Trade Organization, 2017). Kebijakan ini berdampak pada perdagangan sampah dunia, dimana para pengekspor yang sebelumnya mengirim sampah ke Tiongkok mengalami permasalahan sampah yang cukup serius, seperti penumpukan limbah sampah dalam negeri.

**Hubungan Perdagangan antara Hong Kong dan Tiongkok**

 Adanya Deklarasi Bersama Pemerintah Britania Raya dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), tentang masalah Hong Kong yang telah ditandatangani pada 19 Desember 1984, RRT memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong mulai tanggal 1 Juli 1997. Posisi Hong Kong setelah 1 Juli 1997 dibawah pemerintah RRT dan menjadi Daerah Administratif Khusus Hong Kong, yaitu Hong Kong tetap mempertahankan hak-hak dari Britania Raya seperti wilayah pabean yang terpisah dari RRT dan kegiatan ekspor dan impor dengan RRT; memutuskan kebijakan ekonomi dan perdagangannya sendiri dengan menggunakan nama “Hong Kong, Tiongkok”; Hong Kong dapat mempertahankan dan mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara lain; melaksanakan perjanjian dengan negara, wilayah, dan organisasi internasional yang relevan di bidang ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Deklarasi tersebut juga menetapkan bahwa Hong Kong akan memiliki otonomi tingkat tinggi kecuali kepentingan luar negeri dan pertahanan.

 Dalam perjanjian perdagangan bilateral, Hong Kong dan Tiongkok membentuk *Free Trade Agreement* (FTA) dengan menandatangani perjanjian *Closer Economic Partnership Arrangement* (CEPA) pada 29 September 2003 dan mulai efektif pada 1 Januari 2004. Perjanjian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pengurangan tarif atas 273 kategori barang yang diekspor Hong Kong ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pembukaan preferensial pasar Tiongkok ke penyedia layanan Hong Kong pada 18 sektor, dan memfasilitasi pertukaran barang, modal, dan jasa secara bilateral. Hubungan perdagangan ekspor dan impor antara Tiongkok dan Hong Kong terus meningkat, Hong Kong menjadi salah satu eksportir terbesar yang mengirim sampah ke Tiongkok.

**Tabel 1. Daftar Eksportir Terbesar Sampah Plastik Tiongkok Tahun 2010-2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** |  |  |  | **Tahun** | **(Ton)** |  |  |  |
| **Eksportir** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Hong Kong, Tiongkok | 4.069.593 | 3.314.772 | 3.160.473 | 1.414.897 | 2.990.696 | 2.797.668 | 2.807.348 | 1.710.971 |
| Amerika Serikat | 942.004 | 1.176.842 | 1.197.816 | 1.021.278 | 1.094.453 | 860.956 | 712.707 | 558.254 |
| Jepang | 768.925 | 889.910 | 1.054.156 | 1.049.687 | 952.534 | 883.377 | 802.503 | 749.267 |
| Jerman | 658.671 | 763.363 | 799.563 | 640.918 | 644.283 | 574.017 | 562.923 | 345.903 |

**Sumber: Diolah oleh Penulis dari Sumber (*UN Commodity and Trade)***

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Hong Kong menjadi eksportir terbesar Tiongkok sejak 2010-2017 terkait ekpor sampah plastik. Sehingga adanya kebijakan *National Sword* membuat Hong Kong mengalami penumpukan sampah yang mengkhawatirkan, mengingat Hong Kong sangat bergantung pada ekspor sampah ke Tiongkok.

 **Dampak Kebijakan *National Sword* di Hong Kong**

Kebijakan *National Sword* sangat berpengaruh bagi Hong Kong karena sesuai tabel 1 Hong Kong sebagai eksportir sampah plastik terbanyak di Tiongkok. Dari 24 jenis barang yang diimpor oleh Tiongkok, Hong Kong terkena dampak pelarangan pada beberapa jenis barang yang diekspor ke Tiongkok.

**Tabel 2. Daftar Barang Ekspor Hong Kong yang Terkena Dampak Kebijakan *National Sword***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Barang  | Kode  |   | Tahun (Ton) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Limbah dan skrap PE | 391510 | 295.363 | 539.678 | 363.610 | 11.70 | 66 | 0 |
| Limbah dan skrap PS | 391520 | 44.602 | 78.342 | 55.389 | 1.240 | 21 | 38 |
| Limbah dan skrap PVC | 391530 | 93.876 | 73.208 | 61.591 | 375 | 0 | 0 |
| Limbah dan skrap PET | 391590 | 2.363.825 | 2.116.118 | 1.230.380 | 36.540 | 183 | 23 |
| Kertas tidak disortir | 470790 | 200.712 | 129.391 | 109.626 | 35.987 | 0 | 0 |
| Limbah benang | 520210 | 12.092 | 14.750 | 12.050 | 157 | 0 | 0 |
| Limbah kapas | 520299 | 4.598 | 4.487 | 5.300 | 0 | 0 | 0 |
| Limbah serat buatan dari alam | 550510 | 1.573 | 436 | 482 | 0 | 0 | 0 |
| Kain perca yang disortir | 631010 | 5.137 | 1.188 | 842 | 28 | 0 | 0 |
| kain perca yang tidak disortir | 631090 | 5.072 | 3.003 | 3.619 | 11 | 0 | 0 |

 **Sumber: Diolah oleh Penulis dari Sumber (*UN Commodity and Trade)***

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah adanya kebijakan *National Sword*  pada 2018, berdampak pada jumlah barang yang diekspor mengalami penurunan yang signifikan bahkan terdapat beberapa jenis barang yang tidak memiliki data ekspor atau berarti Hong Kong tidak mengekspor barang tersebut karena tidak sesuai dengan standar kontaminasi yang ditetapkan oleh Tiongkok. Dampak pada limbah plastik, kertas dan tekstil setelah adanya kebijakan *National Sword*, yaitu sebagai berikut.

1. Dampak pada limbah plastik

Pada tahun 2018, terdapat 4.17 juta ton limbah padat perkotaan dibuang ke TPA, yang mana 21% berupa limbah plastik. Sampah plastik menumpuk dengan jumlah yang semakin banyak, namun tingkat pemulihan daur ulang plastik menurun dari 13% pada 2017, menjadi 7% pada 2018 (Hendrik Hillebrecht, 2020). Adanya kebijakan *National Sword* membuat minat para pengumpul sampah lokal menurun, karena nilai satu kilogram sampah plastik yang telah dikumpulkan, dipisahkan, dan diproses hanya menghasilkan HKD$0.30-$0.50, yang sebelumnya mampu mengumpulkan HKD$1-$1.5. Harga per ton sampah plastik juga menurun dari HKD$8.700 menjadi HKD$7.800. Selain itu, botol PET yang dibuang di TPA menjadi 4.84 juta per hari pada 2018 (Earth.org, 2020). Peningkatan sampah plastik dan pembuangan sampah plastik ke TPA yang berada di pinggir perairan membuat mencemari perairan Hong Kong. Perairan yang tercemar seperti di Teluk Mirs, Pelabuhan Sai Kung, Pelabuhan Tolo dan Pulau Lantau. Penelitian oleh *Greenpeace East Asia* dan  *Education University* menyatakan bahwa terjadi tingkat terburuk limbah plastik di perairan, terdapat 68% sampah plastik PS, dan 18% plastik PE (Sally Ho, 2019).

1. Dampak pada limbah kertas

Adanya kebijakan *National Sword,* membuat kontainer pengangkut kertas membawa kembali limbah kertas ke Hong Kong. Kertas dan karton menumpuk di dermaga dan jalanan Hong Kong. Menurut direktur asosiasi bisnis daur ulang utama Hong Kong yaitu Jacky Lau, mengatakan bahwa setiap hari di Hong Kong terdapat 2.500 ton sampah kertas menumpuk tanpa ada usaha untuk mendaur ulang. Pada Juni 2019, harga daur ulang untuk kertas dan karton dipotong setengah harga, hal ini membuat menurunnya minat para pengumpul sampah, sehingga berdampak pada penumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan sampah. Selain itu, Industri daur ulang mengalami kerugian sebanyak HKD$2.7 juta setiap hari (Pak Yiu, 2019).

Penyebab penumpukan sampah kertas, yang pertama, tidak adanya daur ulang di Hong Kong, sampah kertas yang dikumpulkan hanya diekspor ke Tiongkok, sehingga adanya larangan impor membuat sampah-sampah kertas tidak memiliki tujuan ekspor dan menumpuk di dalam negeri. Kedua, hanya sedikit pemrosesan daur ulang yang dilakukan dalam negeri sebelum diekspor, sebagian besar kertas yang diekspor bernilai rendah, hal ini membuat sampah kertas tidak sesuai dengan standar kontaminasi yang ditetapkan Tiongkok. Ketiga, sistem daur ulang yang masih tradisional, hanya mengandalkan para pengumpul sampah (hongkongfp.com, 2017).

1. Dampak pada limbah tekstil

Budaya konsumerisme di Hong Kong membuat penggunaan pakaian sekali pakai, dan limbah pakaian yang tidak digunakan hanya dibuang ke TPA dan mengekspor ke negara lain. Adanya kebijakan *National Sword* membuat industri daur ulang tekstil tidak mampu mengatasi lonjakan limbah sampah yang menumpuk di dalam negeri. Pada 2018, terdapat 340 ton limbah tekstil yang hanya dibuang ke TPA (Kong Wai Yeng, 2018). Pada 2020, terdapat sekitar 242 ton limbah tekstil yang dibuang ke TPA setiap hari (Hendrik Hillebrecht, 2020).

Peningkatan pembuangan sampah ke TPA pada 2018 setelah adanya kebijakan *National Sword* menjadi tingkat terburuk sejak 1991. Infrastruktur daur ulang yang buruk, turunnya nilai daur ulang, dan budaya konsumerisme menjadi faktor peningkatan limbah. Para aktivis dan kelompok lingkung mendesak pemerintah Hong Kong untuk membahas lebih lanjut Penerapan RUU Pengendalian Limbah yang terus terhenti. RUU ini diusulkan sejak November 2018, RUU diminta untuk segera diresmikan akibat gagalnya target pengurangan limbah yang telah ditetapkan sejak tahun 2012. RUU ini terhenti setelah pertemuan komite dibatalkan, kemudian dilanjutkan dengan rapat Dewan Legislatif, namun belum ada rencana untuk memulai pembahasan penerapan RUU Pengendalian limbah.

**Upaya Pemerintah Hong Kong**

Untuk mengatasi tingkat pembuangan limbah yang tinggi, penurunan pasar daur ulang eksternal (ekspor limbah daur ulang), dan terbatasnya sumber daya lahan untuk mendaur ulang dan lahan untuk membuang limbah sampah. Pemerintah mencoba melakukan upaya sebagai tindakan pengganti terhentinya RUU pengendalian sampah. Berikut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah setelah dikeluarkannya kebijakan *National Sword.*

1. Upaya dalam Mengatasi Limbah Plastik
2. *Go “Plastic-free”*

Kampanye ini dilakukan setelah meningkatnya polusi mikroplastik di laut sebanyak 11 kali lipat akibat dikeluarkannya *National Sword Policy.* Untuk mendorong masyarakat agar bebas plastik sekali pakai, *Environmental Campaign Committee* (ECC) dan *Environmental Protection Department* (EPD) bekerja sama dengan industri *Food and Beverage* mengadakan 2 program “*Plastic-Free Beach, Tableware First”* dan “*Plastic-Free Takeaway, Use Reusable Tableware*”.

Program “*Plastic-Free Beach, Tableware First”*diadakan pada 19 Juli 2018 yang bertujuan untuk mendorong anggota masyarakat untuk tidak menggunakan plastik di pantai dan mengurangi penggunaan peralatan plastik sekali pakai untuk mengurangi sampah plastik di laut. Program ini mencakup 47 gerai makanan cepat saji, restoran di pantai dan sekitarnya. Program “*Plastic-Free Takeaway, Use Reusable Tableware*” diadakan pada 19 Agustus 2019 yang bertujuan mengurangi plastik saat memesan makanan untuk dibawa pulang. ECC dan EPD bersama dengan 700 restoran di seluruh wilayah mendorong masyarakat untuk membawa peralatan makan sendiri yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan peralatan makan sekali pakai sehingga dapat mengurangi sampah plastik sekali pakai. Selama 2 bulan program berjalan telah mengurangi sekitar 1.2 juta set peralatan makan sekali pakai (Hong Kong Government, 2019).

1. Membangun Industri Daur Ulang HDPE

Pada September 2019, perusahaan daur ulang asal Jerman yaitu ALBA Group bersama dengan perusahaan pengelola limbah lokal Baguio Waste Management & Recycling Ltd*.* dan perusahaan Swire Coca-Cola Ltd. membangun pabrik daur ulang *High Density Polyethylene* (HDPE) di EcoPark Tuen Mun. Fasilitas daur ulang ini akan memproses 35.000 ton sampah plastik berjenis PET dan HDPE setiap tahunnya (baguio.com.hk, 2019).

1. Mendirikan *Alliance to End Plastic Waste* di Hong Kong

*Alliance to End Plastic Waste* merupakan organisasi nirlaba global untuk mengembangkan, menerapkan, dan membawa solusi skala besar untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan memulihkan sampah plastik. Organisasi ini dibentuk pada awal tahun 2019. *Alliance to End Plastic Waste* didirikan di Hong Kong untuk membantu mengatasi sampah plastik ke laut. Organisasi ini membantu perusahaan anggota untuk membangun ekonomi sirkular dan mengakhiri polusi plastik ke lingkungan. *Alliance to End Plastic Waste* di Hong Kong telah membantu membangun pabrik daur ulang baru yang mampu memproses 100 ton sampah plastik setiap hari, menetapkan denda untuk para penghasil sampah plastik, dan mengalihkan lebih banyak dana ke fasilitas daur ulang (covestro.com, 2019).

1. Upaya dalam Mengatasi Limbah Kertas
2. *Waste Paper Collection & Recycling Services*

*Environmental Protection Department* (EPD) mengeluarkan layanan pengumpulan dan daur ulang limbah kertas di seluruh wilayah untuk pertama kalinya pada tahun 2020. EPD telah melibatkan 16 kontraktor melalui kontrak layanan untuk mengumpulkan limbah kertas termasuk kardus, surat kabar, dan kertas kantor dari toko daur ulang pinggir jalan, pendaur ulang keliling, dan para pengumpul diseluruh wilayah. Kontraktor dan mitra terkait diwajibkan untuk memberikan insentif ekonomi selama masa layanan untuk membeli kertas bekas yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan, yaitu tidak terkontaminasi oleh air, kotoran, dan limbah. Membeli kertas dari pengumpul dan produsen dengan harga yang tidak kurang dari HKD$0.75. Hal ini akan membuat para pengumpul tidak kehilangan minat dalam mengumpulkan sampah kertas, karena nilai kertas yang diberikan tidak terlalu rendah (Environmental Protection Department, 2020).

1. Upaya dalam Mengatasi Limbah Tekstil
2. *Making Zero Impact Fashionable*

*Making Zero Impact Fashionable* merupakan sebuah program untuk mempromosikan dan mengedukasi industri tentang keberlanjutan *fashion.* Program ini dilaksanakan oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan pemerintah Hong Kong selama 2 tahun sejak 2018. Menurut *UN Climate Change,* industri *fashion* menyumbang sekitar 10% emisi gas rumah kaca global, karena mengkonsumsi lebih banyak energi. Program ini bertujuan untuk menghasilkan ide dan solusi baru untuk mengatasi tantangan mendesak dalam industri *fashion*, dan mengurangi dampak lingkungan dari seluruh tekstil dan pakaian. Program ini juga membantu perusahaan untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan pengurangan emisi gas rumah kaca (World Wide Fund for Nature, 2020).

1. *Garment to Garment* (G2G)

G2G didirikan pada tahun 2018, sistem daur ulang *Garment to Garment* adalah produksi berskala mini yang didirikan di toko ritel yang mendaur ulang garmen bekas menjadi baru. Hal ini menunjukkan proses daur ulang garmen integral dan loop tertutup. Ini menjadi proses yang ramah lingkungan tanpa menggunakan air dan bahan kimia. Proses daur ulang G2G terdiri dari sanitasi, penyortiran, pembersihan, pemisahan, *design*, pemintalan, dan rajutan. Seluruh proses berlangsung dalam wadah standar yang dilengkapi sistem anti-kebisingan, anti-getaran, dan pengendalian debu (hkrita.com, 2018).

1. Upaya Daur Ulang Limbah Plastik dan Kertas
2. *Reduce and Recycle 2.0*

*Environmental Campaign Committee* (ECC) dan *Environmental Protection Department* (EPD) mengeluarkan kampanye *Reduce and Recycling 2.0* sejak 16 Juni 2020. Kampanye ini mempromosikan konsep hidup hijau dengan slogan “*Save More, Recycling More*” dengan memperluas jaringan daur ulang melalui penambahan outlet dan melakukan pengumpulan lebih banyak jenis yang dapat didaur ulang, seperti sampah kertas, logam, plastik, peralatan listrik yang diatur, peralatan listrik kecil, lampu neon dan tabung, dan baterai isi ulang. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong masyarakat *Go Green,* mendukung *Green Recovery*, dan mempromosikan pengurangan limbah dari sumbernya. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan komunitas daur ulang dengan baik dan mempraktekkan konsep hidup hijau “*Save More, Recycling More*”. EPD akan memastikan bahwa semua daur ulang yang dikumpulkan bersih dan dapat ditangani dengan benar sehingga mampu diubah menjadi sumber daya (Hong Kong Government, 2020).

1. *Green@Community*

Untuk memperkuat dukungan pada pengurangan sampah dan daur ulang, *Environmental Protection Department* (EPD) membangun komunitas daur ulang yang bertujuan untuk menyediakan outlet yang memfasilitasi pemilahan sampah dan daur ulang oleh masyarakat di setiap distrik. Untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan fasilitas daur ulang, EPD memperkenalkan kartu pintar GREENS pada 16 November 2020. GREENS berguna untuk menukarkan minimal 2 Kg sampah daur ulang dengan hadiah yang berupa barang kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan, serta produk ramah lingkungan. *Green@Community* memiliki program *Recycling Stations, Recycling Spots,* dan *Community Smart Recycling Vehicle.* Program tersebut menerima 8 jenis sampah daur ulang termasuk kertas, plastik, logam, botol, kaca, peralatan listrik yang diatur, peralatan listrik kecil, lampu, tabung, dan baterai yang dapat diisi ulang (Hong Kong Government, 2020).

 **Hasil dari Upaya Pemerintah Hong Kong**

Hasil dari upaya pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang yang telah dilakukan Hong Kong selama tahun 2018-2020, dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 3. Total Pembuangan Limbah Padat Perkotaan Hong Kong ke TPA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO  | Jenis Limbah  |  Jumlah Limbah (Ton/Hari)  |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kertas | 2.702 (23.6%) | 2.704 (24.5%) | 2.643 (24.5%) |
| 2 | Plastik | 2.343 (20.5%) | 2.320 (21%) | 2.312 (21.4%) |
| 3 | Tekstil | 392 (3.4%) | 339 (3.1%) | 242 (2.2%) |

**Sumber: Diolah oleh Penulis dari Sumber (Hong Kong Government)**

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa sampah kertas dari 2018-2019 mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 setelah adanya upaya *Waste Paper Collection & Recycling Services*, limbah yang dibuang ke TPA mengalami penurunan. Selain itu, program pengurangan limbah plastik dan tekstil sejak 2018 juga mengalami penurunan setiap tahunnya.

**Tabel 4. Total Daur Ulang Limbah Hong Kong Setelah Kebijakan *National Sword***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis Limbah** | **Jumlah Daur Ulang (Ribu Ton)** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Kertas | 694.6 (39.1%) | 532.5 (32.5%) | 450 (29.3%) |
| 2 | Plastik | 64.2 (3.6%) | 77.1 (4.7%) | 102 (6.6%) |
| 3 | Tekstil | 6.4 (0.4%) | 7.5 (0.5%) | 7.3 (0.5%) |

 **Sumber: Diolah oleh Penulis dari Sumber (*Hong Kong Government)***

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa tingkat daur ulang kertas terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh harga daur ulang yang berada di level terendah akibat kebijakan *National Sword*, sehingga animo pengumpul sampah juga menurun yang berdampak pada menurunnya tingkat daur ulang. Sebelum adanya upaya *Waste Paper Collection & Recycling Services* pada 2020*,* Hong Kong tidak memiliki upaya dan fasilitas untuk mendaur ulang kertas, Hong Kong hanya bergantung pada ekspor sampah. Hal tersebut membuat daur ulang kertas Hong Kong rendah. Tidak seperti daur ulang plastik dan tekstil terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Hong Kong melakukan beberapa upaya dalam mengatasi dampak pada limbah plastik, kertas, dan tekstil. Namun, hal tersebut masih belum cukup dalam mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke TPA. Hasil daur ulang dinilai masih rendah meskipun pada limbah plastik dan tekstil mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai pada tabel 4. Oleh karena itu, limbah yang dihasilkan Hong Kong dengan hasil dari mendaur ulang limbah masih belum sepadan. Hong Kong perlu meningkatkan upaya dalam mengurangi limbah sampah dan meningkatan kegiatan daur ulang.

**Kesimpulan**

 Kegiatan impor sampah Tiongkok menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Tiongkok karena pengolahan limbah yang buruk. Tiongkok sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga Tiongkok mengeluarkan kebijakan larangan impor sampah pada 2018 yaitu kebijakan *National Sword.* Kebijakan *National Sword* membawa dampak yang signifikan terhadap para pengekspor limbah sampah ke Tiongkok, salah satunya Hong Kong. Adanya kebijakan *National Sword* membuat terjadinya penumpukan limbah sampah di Hong Kong khususnya plastik, kertas, dan tekstil. Selain itu, menurunnya kegiatan daur ulang dan harga pengumpulan bahan daur ulang juga menurun. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Hong Kong terhadap impor bahan daur ulang dan mengekspor limbah sampah, membuat fasilitas di Hong Kong sangat terbatas dan masih tradisional.

 Upaya Hong Kong dalam mengatasi dampak akibat kebijakan *National Sword* yaitu sebagai berikut.

1. Upaya dalam mengatasi limbah plastik yaitu kampanye GO “Plastic-free”, membangun industri daur ulang HDPE bersama ALBA Group dan Swire Coca-Cola Ltd., dan mendirikan *Alliance to End Plastic Waste* di Hong Kong.
2. Upaya dalam mengatasi limbah kertas yaitu program *Waste Paper Collection & Recycling Services.*
3. Upaya dalam mengatasi limbah tekstil yaitu program *Making Zero Impact Fashionable,* dan *Garment to Garment.*
4. Upaya daur ulang limbah plastik dan kertas yaitu program *Reduce and Recycling 2.0,* dan *Green@community.*

**Daftar Pustaka**

Al-ademi, R. (2020, April). *The National Sword Policy of China and its Effect on Global Policy*. Diambil kembali dari <https://www.researchgate.net/publication/340439578_The_National_Sword_Policy_of_China_and_its_Effect_on_Global_Policy>

Armstrong, M. (2018, Juni 22). *Statista*. Diambil kembali dari The Countries Importing the World”s Plastic Waste: <https://www.statista.com/chart/14383/countries-importing-plastic-waste/#:~:text=From%201988%20to%202016%2C%20China,waste%20over%20this%20time%20period>

Baguio. (2019). *Plastic Recycling facility*. Diambil kembali dari baguio.com.hk: <http://baguio.com.hk/en-US/resources-support/Plastic%20Recycling%20Facility>

Bank, T. W. (n.d.). *Tackling Increasing Plastic Web*. Diambil kembali dari The Wold Bank: <https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/tackling_increasing_plastic_waste.html>

Comtrade, U. (2020). *International Trade in Goods based on UN Comtrade Data.* Diambil kembali dari <https://comtrade.un.org/>

Covestro. (2019). *The Alliance To End Plastic Waste*. Diambil kembali dari covestro.com: <https://www.covestro.com/en/sustainability/flagship-solutions/alliance-to-end-plastic-waste>

Data, O. W. (2018). *Plastic exports to China by top 10 exporting countries, 2016*. Retrieved from ourworldindata.org: https://ourworldindata.org/grapher/plastic-exports-to-china

Donini, L. (2018, Februari). *National Sword History and Policy*. Diambil kembali dari <https://recycle.ab.ca/wp-content/uploads/2018/02/LorenzoDonini.pdf>

Earth, F. o. (2017, September 23). *Exporting recyclables is not a long-term solution to Hong Kong's waste problem*. Diambil kembali dari hongkongfp.com: <https://hongkongfp.com/2017/09/23/exporting-recyclables-not-long-term-solution-hong-kongs-waste-problem/>

Earth.org. (2020, Juni 26). *Investigation Reveals Plastic in Hong Kong Recycling Bins Sent to Landfills*. Diambil kembali dari earth.org: <https://earth.org/plastic-in-hong-kong-recycling-bins-sent-to-landfills/>

Government, H. (2013, Mei 20). *Hong Kong Blueprint For Sustainable Use of Resources 2013-2022.* Diambil kembali dari <https://www.enb.gov.hk/en/files/WastePlan-E.pdf>

Government, H. K. (2018, Juli 19). *EPD’s “Plastic Free Beach, Tableware First”.* Diambil kembali dari: <https://www.info.gov.hk/gia/general/201807/19/P2018071900259.htm>

Government, H. K. (2019, Agustus 19). *Second Phase of “Plastic-Free Takeaway, Use Reusable Tableware" Saves Over 1 Million Sets of Disposable tableware* Diambil kembali dari: <https://www.info.gov.hk/gia/general/201908/19/P2019081900287.htm>

Government, H. K. (2020). *Waste Paper Collection and Recycling Services*. Diambil kembali dari wastereduction.gov.hk: <https://www.wastereduction.gov.hk/en/waste_paper_collection_and_recycling_services.htm>

Government, H. K. (2020, Juni 16). *Reduce and Recycle 2.0 Campaign Launched to Promote “Save More, Recycle More” Concept.* Diambil kembali dari:<https://www.info.gov.hk/gia/general/202006/16/P2020061600272.htm>

Government, H. K. (2022, Juli 7). *Green@Community*. Diambil kembali dari: <https://www.wastereduction.gov.hk/en/community/crn_intro.htm>

Hillebrecht, H. (2020, November 11). *Hong Kong and the Mission to Solve the Plastic Problem*. Diambil kembali dari Hongkong.ahk.de: <https://hongkong.ahk.de/news/news-details/hong-kong-and-the-mission-to-solve-the-plastic-problem>

HKRITA. (2018). *What is G2G?* Diambil kembali dari hkrita.com: <https://www.hkrita.com/en/garment2garment>

Ho, S. (2019, April 15). *Hong Kong Poisoning Its Own Seas As Plastic Pollution Soars*. Diambil kembali dari greenqueen.com.hk: <https://www.greenqueen.com.hk/hong-kong-poisoning-its-own-seas-as-plastic-pollution-soars/>

Huaquan, Z. (2007). "One China, Four WTO Memberships": Legal Grounds, Relations and Significance. *The Journal of World Investment & Trade.*

Matthew Paterson, S. B. (2005). *Theories of International Relations.* New York: Palgrave Macmillan.

Nature, W. W. (n.d.). *Making Zero Impact Fashionable*. Diambil kembali dari wwf.org.hk: <https://www.wwf.org.hk/en/cities/fashion/clothing/>

Organization, W. T. (2017, Oktober 3). *China's Import Ban On Solid Waste Queried at Import Licensing*. Diambil kembali dari <https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/impl_03oct17_e.htm>

Salim, A. (n.d.). *Politik Hijau*. Diambil kembali dari Academia.edu: <https://www.academia.edu/6110045/Politik_Hijau>

Vincent, A. (2018, Juli). *Green Political Theory*. Diambil kembali dari <https://www.researchgate.net/publication/327125044_Green_political_theory>

Yeng, K. W. (2018, Oktober 10). *Textile recycling for sustainable fashion in HK - now on a bigger scale*. Diambil kembali dari Optionstheedge.com: <https://www.optionstheedge.com/topic/style/textile-recycling-sustainable-fashion-hk-%E2%80%94-now-bigger-scale>

Yiu, P. (2017, September 28). *China ban on waste imports leads to piles of paper abroad, surging prices in China*. Diambil kembali dari reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-china-hongkong-paperrecycling-idUSKCN1C30GR>

Zhu, Y. (2020, September 9). *A Review of Municipal Solid Waste in China: Characteristics, Compositions, Influential Factors and Treatment: A Review of Municipal Solid Waste in China: Characteristics, Compositions.* Diambil kembali dari *Springer*: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-020-00959-9>

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : vviani.indah1004@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)